

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007.
- Azis Syamsudin, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, Saiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Pers Dan PT Syamil Cipta Media, 2006.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat study Hukum (PSH) Fak. Hukum UII Yogyakarta, 2001.
- Barkley, George E. *The Craft Of Public Administration*. Jakarta: Diterjemahkan oleh LP3ES, 1998.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Erwiningsih, Winahyu. *Hak Pengelolaan Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia 2007.
- Hutagalung, Arie S. *Condominium dan Permasalahannya*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Islamy, Irfan. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Khomarudin, *Menelusuri pembangunan perumahan dan permukiman*, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, 1997.
- Koesoemaatmadja. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1999.
- Koswara, E. *et al. Otonomi Daerah: untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba, 2001.
- Kurniasih, S. *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh Di Petukangan Utara-Jakarta Selatan* Vol. 2, No. 3, 2007, Jakarta: Budiluhur, 2007.
- Kuswartojo, Tjuk. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Bandung: ITB, 2005.
- Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum dan kebijakan Publik*, Malang: Setara Press, 2010.
- Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya, Jilid I*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marwati. *Press Release Perumahan dan Pemukiman untuk Rakyat*. Jakarta: Pusat Litbang Pemukiman, Badan Litbang, Departemen Pekerjaan Umum, 2004.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Mc. Gregor, Douglas. *Leadership and Motivation*. Jakarta: Diterjemahkan oleh Rineka Cipta Rineka Cipta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, "*Mensiasati Otonomi Daerah*" dalam *Konsorium Pembaruan Agraria*, Yogyakarta: Insist Press, 2000.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008.
- Pamudji, Sapari Pamudji. *Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara pada Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri Tanggal 15 Februari 1994.
- Parsudi, Suparlan. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan, Perspektif Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 1997.
- Pide, Andi Mustari. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta.:Gaya Media Pratama, 1997.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rian Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Rondinelli. *Development Projects as Policy Experiment: An Adaptive Approach to Development Administration*. Jakarta: Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) CV. Rajawali, 2000.
- Ruslan Acmad, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perokonomian*, Jakarta: Suara Pembaharuan, 2000.
- S.F. marbun, *Hukum Administrasi negara*, Yogyakarta: FH. UII Press, 2013.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Setiawan, Rulli Pratiwi. "Penggusuran Pemukiman Liar di Stren Kali Jagir, Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme", Seminar Nasional Perumahan Pemukiman dalam Pembangunan Kota. Surabaya, Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- _____. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 1994.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Supriyadi. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wirotoomo, Paulus. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tata Cara Pemugaran Pemukiman Kumuh/ Perkotaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.

Jurnal

- Abi Syarwan Wimardana, Rulli Pratiwi Setiawan, Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung

Selatan, Kota Banjarmasin, *JURNAL TEKNIK ITS* Vol. 5, No. 2, (2016)
ISSN: 2337-3539, hlm. 166.

Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, hal. 5.

Muhamad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, NOTARIUS ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015), ISSN:2086-1702, hal. 279.

Taufan Madiasworo, *Urgensi Dan Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendampingan Penyusunan Raperda dan Implementasi Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*, Jakarta, 20 Maret 2018, hlm. 13.

Artikel Internet

KBBI Online. <http://kbbi.web.id/tangan>. Diakses tanggal 30 Juli 2017, 10:50 WIB.

Yanwariyanidwi, "Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia", tersedia di <https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/> (31 Januari 2018)

Muhammad Rusli, Konsep Penanganan Kumuh, sebagai Peluang dan Tantangan, <http://kotaku.pu.go.id/view/3836/konsep-penanganan-kumuh-sebagai-peluang-dan-tantangan-%28bag.-1%29>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

Muhammad Naufal, Kepadatan Penduduk dan Permukiman Kumuh, <https://www.kompasiana.com/naufal11/56641070579373ca06b3fb3b/kepadatan-penduduk-dan-permukiman-kumuh>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

Mgs M. Rizqi Al Fadli, *Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Partisipasi Masyarakat*, <http://kotaku.pu.go.id/view/3798/penanganan-permukiman-kumuh-perkotaan-berbasis-partisipasi-masyarakat>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

Shitoyura, dilema urbanisasi terhadap peningkatan kawasan kumuh, <https://www.kompasiana.com/shitoyura/5a31f97df133441b44182cc4/dilema-urbanisasi-terhadap-peningkatan-kawasan-kumuh>

ilema-urbanisasi-terhadap-peningkatan-kawasan-kumuh, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 23.00 WIB.

Muhamat Andika, Permukiman Kumuh Di Perkotaan Dan Permasalahannya, <https://tambahrejo.wordpress.com/2012/09/06/permukiman-kumuh-di-perkotaan-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

<https://kolom.tempo.co/read/1003883/mengentaskan-permukiman-kumuh/full&view=ok>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

<http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2013/04/sistem-pengawasan-terhadap.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, Pukul 14.00 WIB.

Ali Mashduqi, "Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Politis", diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21143-sistem-pengawasan-melekat,-pengawasan-fungsional-dan-pengawasan-politis>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB.

<http://www.bpk.go.id/news/pengawasan-atas-pengelolaan-keuangan-negara-daerah-perlu-dilakukan-secara-optimal>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

<https://apustpicurug.wordpress.com/mata-kuliah/pengawasan-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/04/15405141/Mengawasi.Pelayanan.Publik?page=all>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB.

<http://ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/berita-ombudsman/155-ombudsman-sebagai-pengawas-pelayanan-publik.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB

<http://www.jdih.net/bandung/2014/artikel/261/harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>, diakses pada Tanggal 8 Mei 2019 Pukul 23.00 WIB.

<http://inspektorsulsel.id/pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pelayanan-publik/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036)